

RINGKASAN

GINA FELISSIMO HALEVI, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan Hibah Bersyarat Hak Atas Tanah Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 494 K/PDT/2018, Ketua: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. dan Anggota: Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

Hibah tidak boleh dibatalkan dikarenakan suatu penghibahan tidak dapat dicabut kembali dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata “Penghibahan dapat dibatalkan jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah” maka hibah dapat dibatalkan. Terjadi pembatalan hibah atas tanah dengan syarat penghibahan yang dibuat secara lisan antara pemberi hibah dengan penerima hibah, syarat hibah tersebut yaitu “Penerima hibah tidak akan meninggalkan kakak perempuan penggugat (pemberi hibah) sampai maut memisahkan”. Syarat hibah tersebut tidak terpenuhi, sehingga pemberi hibah mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri Kupang dan terdapat 2 Putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri dan MA yang menolak pembatalan hibah, serta Pengadilan Tinggi yang menerima pembatalan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Terhadap akta hibah yang dibatalkan oleh pemberi hibah dapat berakibat hukum, pada putusan nomor: 494 K/Pdt/2018 terdapat perbedaan pendapat hakim pada putusan MA dan PN menyatakan bahwa akta hibah tersebut tetap sah sedangkan pada putusan PT menyatakan bahwa akta tersebut dibatalkan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang penerapan hibah bersyarat hak atas tanah terhadap putusan perkara perdata Nomor: 494 K/Pdt/2018 dan akibat hukum terhadap akta hibah yang sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber sebagai atau bahan informasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dengan metode penyajian data yang disajikan dalam bentuk teks naratif deskripsi dan metode analisis data yaitu secara normatif kualitatif

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian tesis ini adalah Pasal 1253 j.o 1266 j.o 1688 KUHPerdata dan pendapat Subekti dalam kasus putusan perkara perdata nomor: 494 K/Pdt/2018 terpenuhi adanya hibah bersyarat. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Mahkamah Agung tidak mengabulkan dikarenakan dalam Pasal 1688 KUHPerdata tidak mengatur bahwa perceraian merupakan salah satu syarat untuk menyatakan hibah batal. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberikan pertimbangan hukum yang berbeda yaitu bahwa Perkawinan Tergugat dan Juliana Manafe sebagai syarat adanya hibah, sehingga setelah berakhirnya perkawinan karena perceraian maka sudah tidak memenuhi syarat hibah dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata.

Akibat hukum terhadap akta hibah yang sudah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Akta Hibah Nomor: 23/V/KOB/2005 yang dibuat oleh PPAT pada putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Hibah tersebut tetap sah secara hukum, sedangkan Pengadilan Tinggi menyatakan Akta Hibah tersebut dibatalkan. Berdasarkan hukum maka putusan terakhir menjadi sah dan mengikat yaitu Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah tersebut tetap sah dan Akta Hibah tersebut tetap sah secara hukum. Pendapat penulis

dalam penelitian ini yaitu penulis lebih setuju kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dikarenakan Pengadilan tersebut telah menerapkan hibah bersyarat hak atas tanah dan hakim menyatakan bahwa hibah tersebut batal dikarenakan tidak memenuhi syarat penghibahan oleh Tergugat/Penerima Hibah. Berdasarkan Pasal 1253 j.o 1266 j.o 1688 KUHPerdara dan pendapat Subekti dalam kasus putusan perkara perdata nomor: 494 K/Pdt/2018 terpenuhi adanya hibah bersyarat, maka hibah tersebut batal dikarenakan penerima hibah tidak memenuhi syarat penghibahan.



SUMMARY

GINA FELISSIMO HALEVI, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Application of Conditional Grants for Land Rights in Civil Case Decisions Number: 494 K/PDT/2018, Chair: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. and Members: Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

A gift cannot be canceled because a gift cannot be revoked and therefore cannot be cancelled, except that based on Article 1688 of the Civil Code "A gift can be canceled if the conditions for the gift are not fulfilled by the recipient of the gift" then the gift can be cancelled. There was a cancellation of a grant of land with the terms of the gift being made verbally between the grantor and the grantee, the terms of the grant being "The grantee will not leave the plaintiff's older sister (the grantor) until death do them part". The conditions of the grant were not fulfilled, so the grantor filed a cancellation of the grant at the Kupang District Court and there were 2 different decisions between the District Court and the Supreme Court which rejected the cancellation of the grant, and the High Court which accepted the cancellation of the grant given by the grantor to the grantee. Regarding the grant deed which is canceled by the grantor there can be legal consequences, in decision number: 494 K/Pdt/2018 there is a difference of opinion of the judges in the Supreme Court and District Court decisions stating that the grant deed remains valid while in the PT decision stating that the deed is cancelled.

This research aims to analyze the judge's considerations regarding the application of conditional grants of land rights to the decision in civil case Number: 494 K/Pdt/2018 and the legal consequences of the grant deed that has been made by the Land Deed Drafting Officer (PPAT).

The research method used is normative juridical research with research specifications that are prescriptive in nature. Writing uses sources or information materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials uses library research with data presentation methods presented in the form of descriptive narrative texts and data analysis methods, namely normative qualitative

The research results obtained in this thesis research are that Article 1253 j.o 1266 j.o 1688 of the Civil Code and Subekti's opinion in the case of the civil case decision number: 494 K/Pdt/2018 fulfill the conditional grant. The judge's consideration at the Kupang District Court and the Supreme Court did not grant it because Article 1688 of the Civil Code does not stipulate that divorce is one of the conditions for declaring a gift void. The Kupang High Court judge gave a different legal consideration, namely that the marriage of the Defendant and Juliana Manafe was a condition for the grant, so that after the marriage ended due to divorce, they no longer fulfilled the grant requirements in the provisions of Article 1688 of the Civil Code.

The legal consequences of the grant deed that has been made by the Land Deed Making Officer (PPAT), namely the Grant Deed Number: 23/V/KOB/2005 which was made by PPAT in the decision of the District Court and Supreme Court stated that the Grant Deed remains legally valid, whereas The High Court declared the Grant Deed cancelled. Based on the law, the final decision becomes valid and binding, namely the Supreme Court states that the grant remains valid and the Deed of Grant remains legally valid. The author's opinion in this research is that the author agrees more with the Kupang High Court's decision because the court has implemented a

conditional grant of land rights and the judge stated that the grant was invalid because the Defendant/Grant Recipient did not fulfill the terms of the grant. Based on Article 1253 j.o 1266 j.o 1688 of the Civil Code and Subekti's opinion in the case of civil case decision number: 494 K/Pdt/2018 if there is a conditional grant, then the grant is canceled because the grant recipient does not fulfill the conditions for the grant.

